BADAN POM

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI

SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP) DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

MARET 2026

DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN SURVEI DAN KUISIONER SURVEI 2
LANDASAN HUKUM 2
LATAR BELAKANG 2
KUISIONER SURVEI 3
BAB II METODOLOGI SURVEI 6
KRITERIA RESPONDEN 6
METODE PENCACAHAN 6
METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI 9
ANALISIS HASIL SURVEI 9
TINDAK LANJUT HASIL SURVEI 10
BAB IV DATA SURVEI 13
DATA RESPONDEN 13
DATA DUKUNG LAINNYA 15
BAB V PENUTUP 177

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN SURVEI DAN KUISIONER SURVEI

LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2023 (tanggal 15 Januari 2023) tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.
4. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LATAR BELAKANG

Direktorat Siber Obat dan Makanan merupakan unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan di ranah siber.

Sebagai unit kerja di sebuah instansi pemerintahan, Direktorat Siber Obat dan Makanan berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) secara berkala setiap bulan kepada para *stake holder* untuk mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KUISIONER SURVEI

Survei dilakukan secara daring melalui link https://tinyurl.com/surveiditsiber. Adapun isi kuisioner survey terdiri atas:

1. Identitas Responden
   a. Nama lengkap
   b. Umur
   c. Jenis kelamin
   d. No. HP
   e. Pendidikan terakhir
   f. Pekerjaan utama
   g. Nama instansi/Perusahaan tempat bekerja/beraktivitas
   h. Persentase tahapan penyelesaian layanan

2. Kualitas Pelayanan [p1]Publik

Tabel. Pertanyaan Kuisioner SPKP

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
1.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan pemenuhan persyaratan pelayanan?	○ Sangat Tidak Mudah ○ Tidak Mudah ○ Kurang Mudah ○ Cukup Mudah ○ Mudah ○ Sangat Mudah	Persyaratan Pelayanan
2.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?	○ Sangat Tidak Mudah ○ Tidak Mudah ○ Kurang Mudah ○ Cukup Mudah ○ Mudah ○ Sangat Mudah	Prosedur/ Alur Pelayanan
3.	Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Waktu Pelayanan
4.	Apakah menurut penilaian Saudara jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Jangka waktu penyelesaian
5.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?	○ Sangat Lambat ○ Lambat ○ Kurang Cepat ○ Cukup Cepat ○ Cepat ○ Sangat Cepat	Kecepatan petugas pelayanan/ sistem pelayanan online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
6.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kejelasan informasi tentang biaya pelayanan?	○ Sangat Tidak Jelas ○ Tidak Jelas ○ Kurang Jelas ○ Cukup Jelas ○ Jelas ○ Sangat Jelas	Biaya Pelayanan
7.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kesesuaian produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan ?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai Sangat Sesuai	Produk/ Jasa Layanan
8.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kompetensi petugas dalam pelayanan?	○ Sangat Tidak Memadai ○ Tidak Memadai ○ Kurang Memadai ○ Cukup Memadai ○ Memadai ○ Sangat Memadai	Kompetensi
9.	Apakah menurut penilaian Saudara, petugas sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik (tulisan atau verbal)?	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Perilaku
10.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Baik ○ Tidak Baik ○ Kurang Baik ○ Cukup Baik ○ Baik ○ Sangat Baik	Konsultasi dan Pengaduan
11.	Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Lengkap ○ Tidak Lengkap ○ Kurang Lengkap ○ Cukup Lengkap ○ Lengkap ○ Sangat Lengkap	Sarana/ Prasarana Pelayanan
12.	Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai ○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	Persyaratan Layanan
13.	Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik?	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang ○ Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Informasi pelayanan
14.	Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan	○ Sangat Tidak Sesuai ○ Tidak Sesuai ○ Kurang Sesuai	Informasi Biaya Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
	ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?	○ Cukup Sesuai ○ Sesuai ○ Sangat Sesuai	

3. Kualitas [p2]Persepsi Anti Korupsi

Tabel. Pertanyaan Kuisioner SPAK

No.	Pertanyaan	Jawaban	Ringkasan
1.	Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Diskriminasi Persyaratan Pelayanan
2.	Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Kecurangan
3.	Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Gratifikasi
4.	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Pungli
5.	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara	○ Sangat Tidak Setuju ○ Tidak Setuju Kurang Setuju ○ Cukup Setuju ○ Setuju ○ Sangat Setuju	Percaloan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II METODOLOGI SURVEI

KRITERIA RESPONDEN

Berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.02.25.87 tanggal 4 Maret 2025 tentang Pelaksanaan SPKP dan SPAK Tahun 2025, terdapat beberapa aturan pelaksanaan SPKP dan SPAK pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara *online* menggunakan tautan dari aplikasi SAPAAPIP yang telah terintegrasi dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk unit kerja non UPP, hasil pengisian survei hanya akan menghasilkan nilai SPKP dan SPAK.
2. Survei dilakukan terhadap seluruh layanan yang ada pada unit kerja dan dilakukan setiap bulan kepada seluruh penerima layanan pada periode bersangkutan.
3. Responden merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%).
   Adapun responden penerima layanan Direktorat Siber Obat dan Makanan tersebut meliputi:
   a. Unit Kerja di Deputi Bidang Penindakan
   b. Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia
   c. Unit Pengawasan di Lingkungan BPOM
   d. Unit Layanan Pengaduan Masyarakat BPOM
   e. Masyakarat

METODE PENCACAHAN

Tabel. Skala dan Kriteria

Skala	Kriteria								
1	Sangat Tidak Mudah	Sangat Tidak Sesuai	Sangat Lambat	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Lengkap	Sangat Tidak Sesuai	Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Jelas	Sangat Tidak Memadai
2	Tidak Mudah	Tidak Sesuai	Lambat	Tidak Baik	Tidak Lengkap	Tidak Sesuai	Tidak Setuju	Tidak Jelas	Tidak Memadai
3	Kurang Mudah	Kurang Sesuai	Kurang Cepat	Kurang Baik	Kurang Lengkap	Kurang Sesuai	Kurang Setuju	Kurang Jelas	Kurang Memadai
4	Cukup Mudah	Cukup Sesuai	Cukup Cepat	Cukup Baik	Cukup Lengkap Lengkap	Cukup Sesuai	Cukup Setuju	Cukup Jelas	Cukup Memadai
5	Mudah	Sesuai	Cepat	Baik	Lengkap	Sesuai	Setuju	Jelas	Memadai
6	Sangat Mudah	Sangat Sesuai	Sangat Cepat	Sangat Baik	Sangat Lengkap	Sangat Sesuai	Sangat Setuju	Sangat Jelas	Sangat Memadai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Nilai indeks dihitung dengan menjumlahkan rata-rata nilai dari setiap unsur pelayanan, kemudian dibagi dengan jumlah unsur yang dinilai.

1. Menghitung Nilai Rata-Rata Unsur (NRR):

$$NRR = \frac{\text{Total Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$$

2. Menghitung Nilai Indeks (Setelah Penimbangan):

$$Indeks = \frac{\sum NRR}{\text{Jumlah Unsur}}$$

3. Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat pembagian rentang nilai yang digunakan untuk menentukan mutu pelayanan. Rentang ini dibagi menjadi dua jenis skala, yaitu skala interval (1-4) dan skala konversi (25-100). Berikut rumus untuk mengkonversi ke Nilai SKM ke dalam skala 100:

$$\text{Nilai SKM} = Indeks \times 25$$

Tabel. Kriteria Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval (IPP/IPAK)	Nilai Interval Konversi (0-100)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5995	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

4. Unsur Penilaian IPP
   Terdapat 8 (delapan) unsur pelayanan yang dinilai untuk IPP.
   Tabel. Unsur pelayanan yang dinilai untuk IPP

Unsur Pelayanan	
1	Kemudahan prosedur/alur pelayanan
2	Waktu pelayanan
3	Respon/kecepatan petugas/aplikasi
4	Penanganan pengaduan
5	Ketersediaan sarana prasarana
6	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7	Informasi pelayanan tersedia melalui media
8	Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai

5. Unsur Penilaian IPAK

Terdapat 5 (lima) unsur pelayanan yang dinilai untuk IPAK.

Tabel. Unsur pelayanan yang dinilai untuk IPAK

Unsur Pelayanan	
1	Diskriminasi pelayanan
2	Kesesuaian prosedur
3	Layanan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang
4	Layanan tanpa praktik pungutan liar
5	Layanan tanpa praktik percaloan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

ANALISIS HASIL SURVEI

Hasil survei IPP dan IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan dapat dimonitor melalui aplikasi SAPAAPIP dengan domain https://sapaapip.pom.go.id/admin/login. Pada bulan Maret 2026 terdapat 42 (empat puluh dua) responden[p3], dan berdasarkan berdasarkan surat Inspektorat Utama perihal Pengembangan Aplikasi SAPAAPIP Modul IPP v2 dan IPAK v2 dengan perubahan ketentuan jumlah responden yang digunakan menjadi seluruh penerima layanan dalam 1 bulan maka data seluruh responden digunakan.

1. Hasil SPKP untuk pengukuran nilai IPP periode Maret 2026

Tabel. Hasil SPKP untuk pengukuran nilai IPP periode Maret 2026

	Unsur Pelayanan	Nilai
1	Kemudahan prosedur/alur pelayanan	3,57
2	Waktu pelayanan	3,67
3	Respon/kecepatan petugas/aplikasi	3,59
4	Penanganan pengaduan	3,68
5	Ketersediaan sarana prasarana	3,63
6	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai	3,71
7	Informasi pelayanan tersedia melalui media	3,68
8	Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai	3,68
Total		**[p4]3,65**

Sesuai dengan tabel di atas, IPP Direktorat Siber Obat dan Makanan pada **bulan Maret 2026** adalah sebesar **3,65** (dari skala 4). Nilai ini termasuk ke dalam kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik).[p5]

2. Hasil SPAK untuk pengukuran nilai IPAK periode Maret 2026

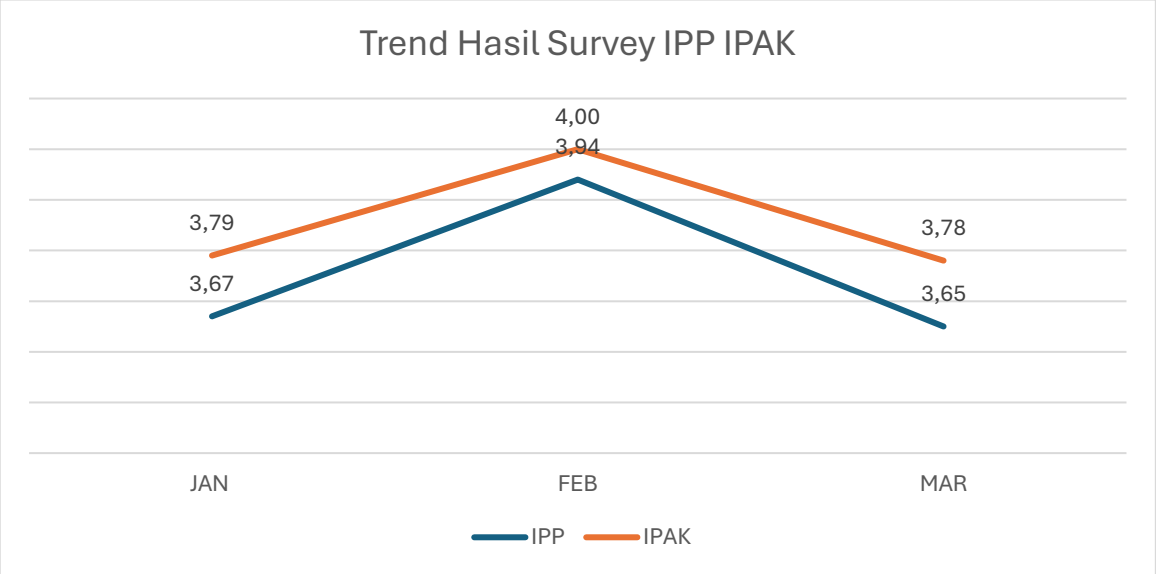
Tabel. Hasil SPAK untuk pengukuran nilai IPAK periode Maret 2026

	Unsur Pelayanan	Nilai
1	Diskriminasi pelayanan	3,78
2	Kesesuaian prosedur	3,76
3	Layanan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang	3,76
4	Layanan tanpa praktik pungutan liar	3,81
5	Layanan tanpa praktik percaloan	3,79
Total		**[p6]3,78**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sesuai dengan Tabel. Kriteria Nilai Persepsi, IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan pada **bulan Maret 2026** adalah sebesar **3,78** (dari skala 4). [p7]Nilai ini termasuk ke dalam kategori Persepsi Bersih dari Korupsi.

3. Berikut merupakan tren nilai IPP IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan pada tahun 2026:



Gambar. Grafik Tren nilai IPP IPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan periode Januari s.d Maret 2026

Pada gambar di atas menunjukkan adanya fluktuasi skor untuk kedua indeks. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, hasil survei IPP dan IPAK merupakan salah satu komponen syarat untuk memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai minimal IPP sebesar 3,20 dan IPAK sebesar 3,60. Mengacu pada hasil survei tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah memenuhi salah satu komponen syarat nilai IPP dan IPAK untuk dapat diajukan memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Rencana tindak lanjut hasil SPKP dan SPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan bulan Maret 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPKP
   Berdasarkan hasil SPKP Direktorat Siber Obat dan Makanan bulan Maret 2026, tidak terdapat saran perbaikan dari responden, Namun demikian, terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang mendapatkan nilai lebih rendah dari unsur lainnya, yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kemudahan prosedur/alur pelayanan dan Respon/kecepatan petugas/aplikasi. Hal tersebut bisa dijadikan intervensi peningkatan pelayanan.

Tabel. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPKP

Rencana Tindak Lanjut	Timeline
Respon/kecepatan petugas/aplikasi	
1. [p8]Validasi dan Pemetaan Masalah 2. Penyampaian permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada *stakeholder* 3. Personel a. Pemantauan SLA internal dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi. b. *Review* terhadap pemberian *reward* & *punishment* c. Pemberian pengarahan oleh pimpinan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau sosialisasi pelayanan prima d. Optimalisasi beban kerja personel 4. Operasional Analisis alur bisnis proses, jika dimungkinkan dilakukan penyederhanaan 5. Aplikasi a. Penyediaan Fitur *Tracking* Status (misal: "Sedang Diverifikasi", "Dalam Proses", "Selesai") b. Penyediaan Fitur Notifikasi: Kirimkan update melalui WhatsApp atau Email setiap kali ada perubahan status layanan. c. Transparansi Antrean: Tampilkan estimasi waktu tunggu agar masyarakat memiliki ekspektasi yang realistis.	Rencana pelaksanaan rutin berkala mulai mulai TW I s.d. TW IV Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kemudahan prosedur/alur pelayanan	
1. Personel a. Peningkatan kemampuan petugas pelayanan public melalaui bimbingan teknis atau sosialisasi pelayanan prima b. Review pedoman operasi siber obat dan makanan c. Mengoptimalkan peran petugas layanan dan kanal konsultasi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses layanan. 2. Aplikasi a. Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi inawebcrawler maupun ADP	Rencana pelaksanaan rutin berkala mulai mulai TW I s.d. TW IV Tahun 2026

2. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPAK

Berdasarkan hasil SPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan bulan Maret 2026, tidak terdapat saran perbaikan dari responden, sehingga tidak ada langkah intervensi terhadap rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan. Namun demikian, Direktorat Siber Obat dan Makanan tetap berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tetap optimal dan prima.

Tabel. Rencana Tindak Lanjut Hasil SPAK

Rencana Tindak Lanjut	Timeline
-	-

[p9]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV DATA SURVEI

DATA RESPONDEN

Tabel. Data Responden periode Maret 2026

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	Muhammad Ilham, S. Si	30	Laki-laki	S1
2	Muhammad Fachreza Ramadhan	30	Laki-laki	S1
3	Desak Ketut Andika Andayani	60	Perempuan	S2/Profesi/S3
4	Anak Agung Istri Puspitayani	50	Perempuan	S1
5	Dwi Ahmadi Dipowaseso	29	Laki-laki	S1
6	ROSSY	59	Perempuan	S2/Profesi/S3
7	Rudi Arfiansyah	33	Laki-laki	S2/Profesi/S3
8	Arham	45	Laki-laki	S1
9	Veronika Sandra Lolita	46	Perempuan	S2/Profesi/S3
10	Syahril Ramadan	23	Laki-laki	≤ SMA/Sederajat
11	Naufal Haryoseto Zahiruddin, SH	29	Laki-laki	S1
12	Ayu Afiatul Kamala, S.H.	32	Perempuan	S1
13	Wahyu Dharma Hadi Saputra	23	Laki-laki	S1
14	Kurniasanti	44	Perempuan	S2/Profesi/S3
15	Iqlima Aulia Fiddina	25	Perempuan	S1
16	I Gede Agus Juniarka, S.Farm, Apt, M.Sc	39	Laki-laki	S2/Profesi/S3
17	Agung Rizky Hariyo Putro	35	Laki-laki	S1
18	Mega Gunawan, S.Farm., Apt.	36	Perempuan	S2/Profesi/S3
19	Bulova Deagustuta Bias Permana	31	Laki-laki	S1
20	Naomi Puntu Rantelili	48	Perempuan	S2/Profesi/S3
21	Teddy Ryan Fambrene, S.Si	32	Laki-laki	S1
22	Dodik Hartanto	42	Laki-laki	S1
23	Khaerul Asmansyah	37	Laki-laki	S1
24	Arief Prasetyo Wibowo	47	Laki-laki	S2/Profesi/S3
25	Asmin Alwi, S.Si, Apt	42	Laki-laki	S2/Profesi/S3
26	Zahron Ahmad Zuhairy	30	Laki-laki	S1
27	Wahyu Puspita Dewi	42	Perempuan	S2/Profesi/S3
28	Winda Olivia Christin Ferdinandus	33	Perempuan	S1
29	Rainer Yudhistira Nampe	37	Laki-laki	S1
30	Zainal Arifin	38	Laki-laki	S1
31	Dinar Yoggy Pindarto	40	Laki-laki	S1
32	Nurkamilah	31	Perempuan	S1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

33	Much Agung Maulana	27	Laki-laki	S2/Profesi/S3
34	Ni Made Dwi Sukmayanti	45	Perempuan	S2/Profesi/S3
35	Jandri Duvico Sihaloho, S.Farm., Apt.	38	Laki-laki	S2/Profesi/S3
36	Riad Ismar	30	Laki-laki	S1
37	Tedy wirawan	56	Laki-laki	S2/Profesi/S3
38	Bahrul Amri	40	Laki-laki	S2/Profesi/S3
39	Yesicha Megawarni Lumban Raja	23	Perempuan	S1
40	Joni edrus s	55	Laki-laki	S2/Profesi/S3
41	Julius M Saragih	31	Laki-laki	S1
42	Diyah Kartika Dewi, S.T.P	32	Perempuan	S1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DATA DUKUNG LAINNYA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS
NOMOR: PI.06.06.63.03.26.200

Yth.	:	1. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat dan NAPPZA 2. Direktur Pengawasan Kosmetik 3. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi 6. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
Dari	:	Direktur Siber Obat dan Makanan
Lampiran	:	-
Hal	:	Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Direktorat Siber Obat dan Makanan Bulan Desember Maret Tahun 2025
Tanggal	:	09 Maret 2025

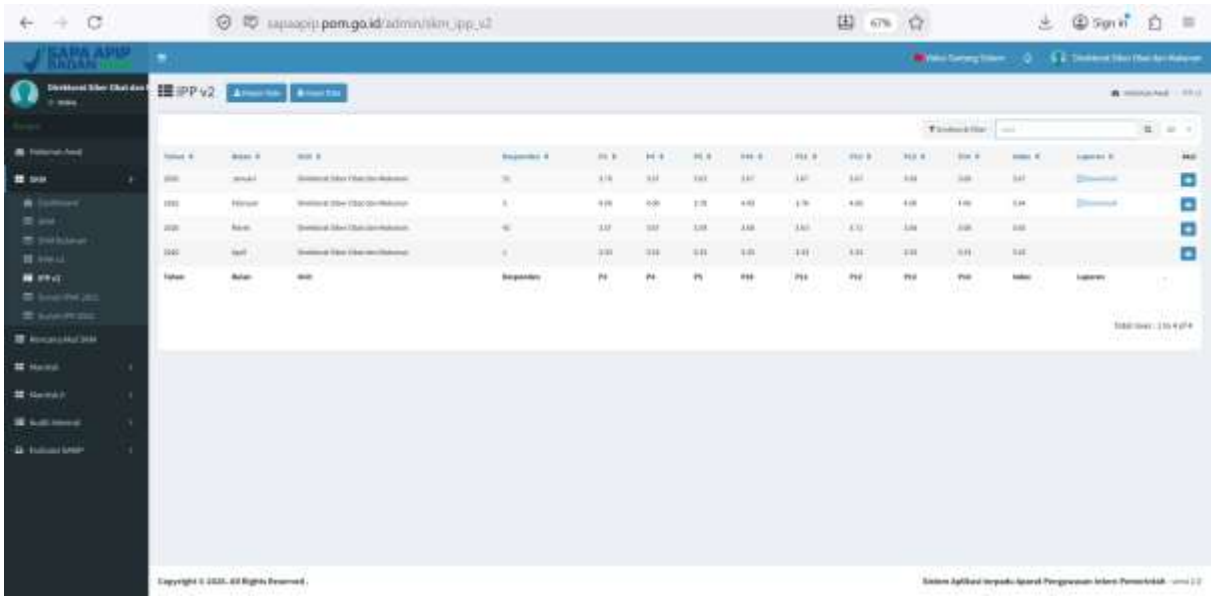
Dalam rangka pelaksanaan penilaian Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PANRB No. 4 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi ZI, maka Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara berkala setiap bulannya untuk periode Tahun Anggaran 2025.
Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan Unit Kerja terkait agar dapat menugaskan 1 (satu) orang pegawai untuk menjadi responden dan mengisi SPKP dan SPAK Direktorat Siber Obat dan Makanan pada periode September 2025 melalui tautan link https://tinyurl.com/surveiditsiber.
Adapun hasil pengisian survei sebagaimana dimaksud di atas, dapat kami terima paling lambat pada Jumat, 27 Maret 2025. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Wiwit Purwandari (HP +62 856 91428652).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Nur Iskandarsyah

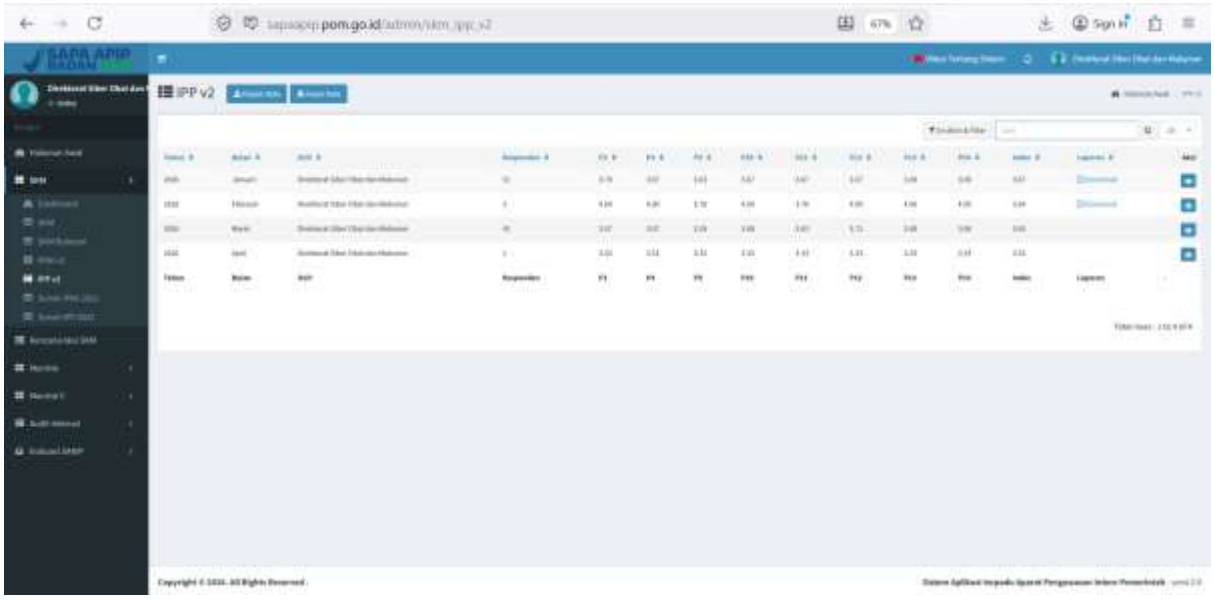
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar. Tangkapan layar permohonan pengisian SPKP dan SPAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar. Tangkapan layar Aplikasi SAPAAPIP menu IPP



Gambar. Tangkapan layar Aplikasi SAPAAPIP menu IPAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V PENUTUP

Direktorat Siber Obat dan Makanan telah melaksanakan SPKP dan SPAK untuk periode **Bulan Maret Tahun 2026** dengan total responden yaitu 42 (empat puluh dua) orang dan hasil sebagai berikut:

Tabel. Nilai IPAK dan IPP Direktorat Siber Obat dan Makanan Bulan Maret Tahun 2026

IPP	IPAK
Nilai **3.65** (dari skala 4)	Nilai **3,78** (dari skala 4)
Predikat sangat baik	Kategori A (Bersih dari Korupsi)

Mengacu pada hasil survei tersebut, Direktorat Siber Obat dan Makanan telah memenuhi salah satu komponen syarat nilai IPAK dan IPP untuk dapat diajukan memperoleh predikat menuju WBK. Namun begitu, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan performa layanan sebagai bagian dari peningkatan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan. Mengingat *stakeholder* merupakan *partner*, maka masukan dari stakeholder diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan *stakeholder* terhadap layanan, sehingga sinergi keduanya akan mendorong pemilik layanan publik memberikan pelayanan prima.

Jakarta, 6 April 2026
Direktur Siber Obat dan Makanan

Nur Iskandarsyah, S.IP, M.T, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).